

Judul : Sikap senayan soal Pulau Galang untuk warga Gaza, ada yang dukung, ada yang minta kaji dulu
Tanggal : Senin, 11 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Sikap Senayan Soal Pulau Galang Untuk Warga Gaza

Ada Yang Dukung, Ada Yang Minta Kaji Dahulu

Kalangan Senayan bersikap pro kontra menanggapi rencana Pemerintah menyiapkan Pulau Galang sebagai lokasi perawatan medis bagi warga Gaza yang terluka akibat konflik.

ANGGOTA Komisi XIII DPR Mafirion menilai, kebijakan ini menunjukkan keberpihakan nyata Indonesia terhadap Palestina. Sekaligus menegaskan komitmen menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap orang, tanpa pengecualian.

"Program bantuan medis ini adalah dukungan konkret, bukan sekadar diplomasi," tegas Mafirion, Minggu (10/8/2025).

Menurutnya, setiap orang memiliki hak asasi yang melekat sejak lahir sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal HAM, termasuk hak untuk hidup, bebas dari penyalahgunaan, dan hak-hak lain tanpa diskriminasi. Keputusan Presiden ini adalah wujud tanggung jawab kemanusiaan Indonesia bagi warga Gaza, terutama dalam pemenuhan hak hidup melalui

penyediaan perawatan medis.

Mafirion bilang, pengobatan di Pulau Galang bukan relokasi permanen, melainkan misi kemanusiaan. Indonesia pernah membangun rumah sakit di Gaza yang kini hancur akibat perang, dan kini kembali menunjukkan komitmen melalui pengobatan medis di dalam negeri.

Pemerintah, tambahnya, tentu akan menyiapkan sarana-prasarana, obat-obatan, tenaga medis, dan mekanisme pemindahan pasien dari Gaza. Namun, diingatkan agar program ini tidak berubah menjadi relokasi jangka panjang dan harus ada mekanisme evakuasi kembali ke Gaza setelah sembuh.

Berbeda pandangan, Anggota Komisi I DPR Amelia Anggraini menilai, rencana membawa 2.000 warga Gaza ke Pulau Ga-



Mafirion

lang bisa menjadi bumerang bagi perjuangan hak kembali (right of return) warga Palestina. Israel bisa menganggap evakuasi itu sebagai eksodus permanen.

Menurut Amelia, Indonesia sebaiknya mendorong negara-negara Arab terdekat seperti Mesir, Yordania, Qatar, atau Uni

Emirat Arab untuk menyediakan layanan medis. "Ketimbang Indonesia justru mengambil langkah ekstrem dengan membawa korban konflik ke luar wilayah Timur Tengah," ujarnya.

Ia mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati agar langkah ini tidak merugikan Indonesia

secara diplomasi. Amelia meminta adanya konsultasi terbuka dengan DPR, kejelasan diplomatik, kesiapan teknis, dan strategi yang matang agar tidak timbul multitafsir.

Politikus NasDem itu menegaskan, penanganan medis harus bersifat sementara, terukur, dan terkoordinasi dengan PBB, UNRWA, serta lembaga kemanusiaan internasional lainnya. Jika berlangsung terlalu lama, dikhawatirkan memicu masalah domestik, seperti tekanan pada fasilitas, konflik budaya, atau lemahnya pengawasan.

Sebagai catatan, Pulau Galang pernah menjadi lokasi kamp pengungsian bagi sekitar 250 ribu warga Vietnam selama 17 tahun. Kamp seluas 80 hektare itu memiliki fasilitas pendidikan, rumah ibadah, dan layanan kesehatan, beroperasi melalui kerja sama Indonesia-UNHCR, dan resmi ditutup pada 1996. Kini, kawasan tersebut menjadi destinasi wisata sejarah bernama Kampung Vietnam. ■ TIF